**ANALISIS HUKUM PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2
TAHUN 2012 TENTANG PENYESUAIAN BATASAN TINDAK
PIDANA RINGAN DAN JUMLAH DENDA DALAM
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA**

**Oleh: Ahmad Hadi Ikhrom
Pembimbing I : Mukhlis R., S.H., M.H
Pembimbing II: Erdiansyah, S.H., M.H
Alamat: Jl. Melati RT 02/RW 01 Desa Kepenuhan Raya Kecamatan
Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu
Email: adjavara@gmail.com**

ABSTRACT

Normatively, minor theft under Article 364 Book of the Criminal Justice Act, has become a key element of assessment standards to be qualified to the crime, ie, if the price of the goods stolen is not more than two hundred and fifty dollars. However, sociologically, the application of the article applied to the perpetrators of the theft to the value of the stolen goods prices more than two hundred and fifty dollars to be based on Supreme Court Regulation No. 2 of 2012.

The purpose of writing this thesis, namely: First, to know the concept of minor criminal offenses before and after the Supreme Court Regulation No. 2 of 2012. Secondly, to determine the legal issues after the enactment of the Supreme Court Regulation No. 2 of 2012.

From the research, it can be concluded two main things. First, the concept of minor criminal offenses before and after the Supreme Court Regulation No. 2 of 2012 has differences and similarities within the scope of substantive criminal law and criminal law formal. Equations within the scope of substantive criminal law is related to the threat of imprisonment to perpetrators and absence of protection to victims of crime a misdemeanor. While the equations within the scope of formal criminal law is procedural law is the law used by the event quick check shows. Differences in the scope of the substantive criminal law is not entirely change the provisions regarding misdemeanor. While the differences in the scope of the formal criminal law is subject to arrest offenders if the value of the goods or money is the object of the case more than Rp. 250, -. After the enactment of the Supreme Court, offenders subject to arrest if the value of the goods or money is the object of the case more than Rp. 2.500.000, -. Second, the legal issues after the enactment of the Supreme Court is still a violation of human rights because of the persistence of the detention of minor criminals, without exception to the prosecutor's indictment then the case will still be processed, checked by regular inspection and the case is not considered as a follow-criminal misdemeanor, and lack of socialization to the public prosecutor so as not to indict the Supreme Court according to Regulation (wrong in making the accusation).

Keywords: Supreme Court Rules-Theft Light

A. Pendahuluan

Salah satu hal penting yang akan menjadi batu pondasi wajah peradilan pada masa yang akan datang dalam khazanah sejarah institusi Mahkamah Agung adalah terkait dengan sektor pemberian akses terhadap keadilan. Dari tiga aturan yang bertujuan untuk memberikan akses yang lebih baik kepada masyarakat miskin dan terpinggirkan dalam memperoleh keadilan yang lebih proporsional, dan memenuhi prinsip-prinsip peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan salah satunya adalah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 mengenai penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang meredefinisi ulang nilai kerugian sebagaimana diatur dalam Pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan Pasal 482 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sehingga batasan kategori tindak pidana ringan disesuaikan dengan nilai ekonomis yang berlaku saat ini.¹

Pengaturan tersebut memungkinkan pengadilan untuk lebih memberikan rasa keadilan bagi masyarakat, seraya

menghindari kritikan masyarakat akibat proses persidangan yang sering dituding tidak proporsional, padahal hal ini semata-mata disebabkan sudah tidak relevannya produk aturan hukum pidana, bukan sekedar absennya hati nurani aparat peradilan terhadap rasa keadilan masyarakat.²

Berdasarkan dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan perkara dengan menggunakan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012, maka hal tersebut dapat dikatakan sebagai salah satu upaya dan bagian dalam implementasi kebijakan kriminal yang terkait dengan perlindungan hukum bagi pelaku tindak pidana ringan. Oleh karena itu, hal ini menjadi isu hukum yang sangat menarik untuk dibahas dan dilakukan penelitian dengan alasan:

- 1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 sebagai peraturan yang dikeluarkan oleh lembaga yudikatif (Mahkamah Agung) bertentangan dengan ketentuan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai produk yang pada hakikatnya dikeluarkan oleh “lembaga legislatif”. Ditinjau dari ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan

¹ Dua Peraturan lainnya yang terkait dengan sektor pemberian akses terhadap keadilan di pengadilan bagi masyarakat miskin adalah Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 06 Tahun 2012 tentang Pengesahan Akta Kelahiran yang Terlambat Satu Tahun dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026 KMA/SK/II/2012 tentang Pelayanan Peradilan. Lihat: Laporan Tahunan Mahkamah Agung Tahun Kerja 2012, hlm. 4-5.

² *Ibid.*, hlm. 5-6.

Mahkamah Agung tersebut sudah mengubah aturan normatif terhadap nilai uang pada Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu dari sebelumnya tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah menjadi tidak lebih dari dua juta lima ratus ribu rupiah.

- 2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 merupakan peraturan yang hanya mengikat terhadap salah satu sub sistem dari sistem peradilan pidana terpadu, yaitu terbatas pada lembaga pengadilan. Dengan demikian, kebijakan secara parsial tersebut, tidak akan mudah mewujudkan keterpaduan dengan sub sistem yang lain dari sistem peradilan pidana terpadu secara bersama-sama atau secara simultan, seperti dengan lembaga penegak hukum yang berwenang melakukan penyidikan (kepolisian) dan yang berwenang melakukan penuntutan (penuntut umum).

Dari uraian di atas, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul "*Analisis Hukum Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*". Hal ini selain disebabkan permasalahan dilakukan Pemeriksaan Acara Cepat terhadap tindak pidana pencurian ringan yang secara normatif harus dilakukan dalam

bentuk Pemeriksaan Acara Biasa, juga terkait dengan ketentuan normatif terhadap suatu perbuatan pidana yang digolongkan sebagai pencurian ringan.

B. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimanakah konsep tindak pidana ringan sebelum dan sesudah berlakunya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012?
- 2) Bagaimanakah permasalahan hukum setelah ditetapkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012?

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1) Tujuan Penelitian

- a) Untuk mengetahui konsep tindak pidana ringan sebelum dan sesudah berlakunya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012.
- b) Untuk mengetahui permasalahan hukum setelah ditetapkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012.

2) Kegunaan Penelitian

- a) Secara Teoritis
 1. Menambah wawasan penulis terhadap implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012.
 2. Memberikan sumbangan pikiran kepada peneliti lanjutan sebagai bagian dari perkembangan khasanah keilmuan.

b) Secara Praktis

Memberikan informasi kepada masyarakat tentang terhadap penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana, khususnya yang terkait dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012.

D. Kerangka Teori

1) Teori Tindak Pidana

Gambaran umum suatu tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang memenuhi perumusan delik, melawan hukum dan pembuat bersalah melakukan perbuatan itu.³ Tinjauan tentang tindak pidana dan hukuman beserta cabang-cabangnya, akan membawa pada kesimpulan bahwa masing-masing teori sifat hukuman dan problema terkait dari pelanggaran hukum telah menjelaskan salah satu aspek persoalan. Hukuman seringkali diterima secara sadar oleh mereka yang melakukan pelanggaran itu (teori persetujuan), dan dirasakan oleh mayoritas yang memahaminya sebagai penebusan yang adil bagi pelanggaran tersebut (teori pembalasan dendam). Hukuman juga menyebabkan

orang lain mempertanyakan pemahaman yang kontroversial itu untuk menghindari hukuman dengan mematuhi hukum (teori intimidasi); mendorong mereka yang telah dihukum untuk mematuhi hukum dikemudian hari (teori pembaruan); dan mendorong administrator memperkuat sarana pemberlakuannya (teori keamanan).⁴

Tindak pidana menurut Simons adalah kelakuan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab. Menurut Moeljatno: perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut. Sedangkan menurut Teguh Prasetyo yang dimaksud dengan tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar hukum dilakukan dengan kesalahan oleh orang yang mampu bertanggung jawab dan pelakunya diancam dengan pidana.⁵

³ Komariah Emong Sapardjaja, *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel dalam Hukum Pidana Indonesia: Studi Kasus tentang Penerapan dan Perkembangannya dalam Yurisprudensi*, Alumni, Bandung, 2002, hlm. 22.

⁴ Raisul Muttaqien (Penerjemah), *Filsafat Hukum: Perspektif Historis*, Nusamedia, Bandung, 2008, hlm. 266. Diterjemahkan dari: Carl Joachim Friedrich, *The Philosophy of Law in Historical Perspective*, The University of Chicago Press.

⁵ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 217.

2) Teori Tindak Pidana Ringan

Menurut Simons, pada mulanya para ahli hukum telah membagi tindak pidana ke dalam tiga jenis tindakan yang mereka sebut *crimina atrocissima, atrocita* dan *levia* yang tidak didasarkan pada sesuatu asas tertentu, melainkan hanya didasarkan pada berat ringannya kejahatan, di mana berat ringannya kejahatan itu semata-mata hanyalah mereka dasarkan pada berat ringannya hukuman yang telah diancamkan.⁶

Mengenai latar belakang keberadaan kejahatan-kejahatan ringan (*lichte misdrijven*) diberikan komentar oleh Wirjono Prodjodikoro bahwa kejahatan ringan ini dalam zaman penjajahan Belanda ada artinya, oleh karena semua orang, tanpa diskriminasi, yang melakukan kejahatan ringan ini, diadili oleh *Landrechter* seperti semua orang yang melakukan pelanggaran, sedang seorang Indonesia atau Timur Asing (Cina, Arab dan India-Pakistan) pembuat kejahatan biasa, diadili oleh *Landraad* (sekarang pengadilan negeri) dan seorang Eropa sebagai pembuat kejahatan biasa diadili oleh *Raad van Justitie* (sekarang Pengadilan Tinggi). Di masa penjajahan Belanda,

terdapat beragam pengadilan dengan kewenangannya masing-masing. Di masa itu, orang Indonesia dan Timur Asing yang melakukan kejahatan (*misdrijf*) biasa diadili oleh *Landraad*, sedangkan seorang golongan Eropa yang melakukan kejahatan biasa diadili oleh *Raad van Justitie*. Untuk delik pelanggaran (*overtreding*) dan kejahatan ringan, semua orang dengan tidak melihat golongan penduduk diadili oleh *Landrechter*.⁷

Kejahatan-kejahatan ringan tidak ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda. Kejahatan ringan hanya ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia. Dengan demikian, kejahatan-kejahatan ringan sebenarnya telah kehilangan latar belakang pertimbangan pembentukannya.⁸

E. Metode Penelitian

1) Jenis Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan mengkaji rumusan masalah melalui pendekatan yuridis-normatif sehingga dilihat dari jenisnya, penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Cakupan

⁶ P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 208-209.

⁷ Alvian Solar, 2012, "Hakikat dan Prosedur Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan", *Lex Crimen*, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado, Vol.I/No.1/Jan-Mrt, hlm. 53-54.

⁸ *Ibid.*, hlm. 54.

penelitian hukum normatif,⁹ dalam penelitian ini dibatasi terhadap pembahasan mengenai asas-asas hukum pidana dan sinkronisasi dalam pelaksanaan hukum pidana dengan mengambil sampel berupa putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap.

2) Sumber Data

Data yang digunakan adalah data sekunder dengan sumber dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier.

- a) Bahan hukum primer adalah data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Bahan hukum primer dalam penelitian ini antara lain berupa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan putusan-putusan pengadilan yang terkait tindak pidana ringan.
- b) Bahan hukum sekunder adalah data yang diperoleh

⁹ Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Penelitian hukum normatif ini mencakup: (1) penelitian terhadap asas-asas hukum; (2) penelitian terhadap sistematis hukum; (3) penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horisontal; (4) perbandingan hukum; dan (5) sejarah hukum. Lihat: Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, PT RajaGrafindo Persada, 2001, Jakarta, hlm. 13-14.

dari buku-buku literatur yang terkait dengan objek kajian dari penelitian ini.

- c) Bahan hukum tertier adalah data yang diperoleh dari informasi yang berasal dari *website* atau data elektronik dan kamus bahasa maupun kamus hukum.

3) Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu tidak dianalisis dengan menggunakan statistik atau matematika namun cukup dengan menguraikan data secara deskriptif. Metode penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif, yaitu penarikan kesimpulan dari hal yang bersifat umum kepada hal yang bersifat khusus.

F. Pembahasan

A. Konsep Tindak Pidana Ringan Sebelum dan Sesudah Berlakunya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

1. Konsep Tindak Pidana Ringan Sebelum Berlakunya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012

Pada abad ketujuh belas di Jerman delik dibagi atas tiga macam, yaitu *delicta atrocissima* (delik terberat), *delicta atrocita* (delik berat), dan *delicta levia* (delik

ringan). *Code Penal* Perancis yang sangat mempengaruhi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana negeri Belanda dan Indonesia, membagi delik itu atas tiga jenis, yaitu kejahatan besar, kejahatan ringan, dan pelanggaran. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana negeri Belanda dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia sebelum tahun 1918 delik itu juga dibagi atas tiga macam.¹⁰

Dalam *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie* yang berlaku mulai 1 Januari 1918 yang masih dipakai sampai sekarang di Indonesia, terkenal dengan nama Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia, pembagian delik dalam tiga macam itu ditinggalkan, dan diganti dengan pembagian atas dua macam, yaitu *misdrijven* (kejahatan-kejahatan termuat dalam Buku II) dan *overtredingen* (pelanggaran-pelanggaran termuat dalam Buku III), walaupun di dalam *misdrijven* (kejahatan-kejahatan) itu masih ada yang disebut *lichte misdrijven* (kejahatan ringan). Berhubung dengan itu pada hakekatnya Kitab

Undang-Undang Hukum Pidana sekarang inipun dapat dikatakan mengenal pembagian delik atas tiga macam, yaitu kejahatan, kejahatan ringan, dan pelanggaran. Kejahatan ringan itu semuanya ada sembilan macam dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu:¹¹

- a. Pencurian ringan (Pasal 364);
- b. Penggelapan ringan (Pasal 373);
- c. Penipuan ringan (Pasal 379);
- d. Penganiayaan ringan (Pasal 352);
- e. Penghinaan ringan (Pasal 315);
- f. Penipuan ringan atas pembeli (Pasal 384);
- g. Merusak barang ringan (Pasal 407);
- h. Penganiayaan ringan binatang (Pasal 302); dan
- i. Tadah ringan (Pasal 482).

Kejahatan ringan adalah tindak pidana tertentu yang pidananya paling lama tiga bulan kurungan dan sasarannya paling banyak bernilai dua ratus lima puluh rupiah atau akibatnya tidak sedemikian membahayakan kepentingan umum.¹² Berdasarkan Pasal I Peraturan Pemerintah

¹⁰ R. Soesilo, *Pokok-pokok Hukum Pidana: Peraturan Umum dan Delik-delik Khusus*, Politea, 1984, Bogor, hlm. 22.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 22-23.

¹² Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 81-82.

Pengganti Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1960 tentang Beberapa Perubahan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, disebutkan bahwa kata-kata “*vijf en twintig gulden*” dalam Pasal-Pasal 364, 373, 379, 384 dan 407 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diubah menjadi “dua ratus lima puluh rupiah”. Berdasarkan ketentuan ini maka harga barang menurut ketentuan pada Pasal 364, 373, 379, 384 dan 407 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diubah dari Rp25,- menjadi Rp250,-. Dari hal ini maka Pasal 364, 373, 379, 384 dan Pasal 407 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berubah redaksinya yang disebabkan oleh Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, bukan oleh suatu Peraturan Mahkamah Agung.

2. Konsep Tindak Pidana Ringan Sesudah Berlakunya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012

Tahun 2012 merupakan tahun penting bagi pemberian akses publik terhadap keadilan. Pada bulan Februari 2012, Mahkamah Agung mengesahkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan

Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pada intinya Peraturan Mahkamah Agung ini menyesuaikan penafsiran tentang nilai uang dalam definisi pidana ringan pada Pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan 482 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang sudah setengah abad tidak pernah dirubah dengan mengalikan nilai yang tertulis pada pasal-pasal tersebut dengan 10.000 kali berdasarkan tingkat kenaikan harga emas sejak tahun 1960, ketika aturan-aturan tersebut terakhir kali disesuaikan. Sehingga nilai 250 rupiah akan dibaca menjadi 2,5 juta rupiah. Peraturan Mahkamah Agung ini sama sekali tidak bermaksud mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai sumber hukum pidana, Mahkamah Agung hanya melakukan penyesuaian nilai uang yang sudah sangat tidak sesuai dengan kondisi sekarang ini.¹³

Dalam mengoptimalkan penanganan perkara, Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Umum meningkatkan kerjasama dan koordinasi antara lain dengan mempedomani Nota

¹³ Laporan Tahunan Mahkamah Agung Tahun Kerja 2012, hlm. 138-139.

Kesepahaman Bersama/Keputusan Bersama antara Kejaksaan Agung Republik Indonesia dengan Kementerian/Lembaga baik langsung atau tidak langsung yang terkait dengan penanganan perkara. Salah satu bentuk Nota Kesepahaman yang telah dilakukan adalah Nota Kesepakatan bersama ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat serta Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Nomor: 131/KMA/SKB/2012, Nomor: M.HH-07.HM.03.2 Tahun 2012, Nomor: KEP-06/E/EJP/10/2012 Tanggal 17 Oktober 2012.¹⁴

Dari uraian di atas, penulis berpendapat bahwa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tersebut sudah memberikan pengaturan suatu ketentuan pidana yang baru terhadap beberapa tindak pidana kejahatan ringan yang pada dasarnya

menjadi kewenangan dari pembentuk undang-undang. Atau dengan kata lain, dalam hal dikeluarkannya peraturan tersebut, Mahkamah Agung bertindak seolah sebagai lembaga legislatif bukan sebagai lembaga yudikatif.

3. Persamaan Konsep Tindak Pidana Ringan Sebelum dan Sesudah Berlakunya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012

a. Perlindungan terhadap Korban Tindak Pidana Ringan Belum Dimuat Secara Komprehensif

Bekerjanya lembaga peradilan dalam proses peradilan pidana sangat berfokus pada pelaku tindak pidana, baik mengenai kedudukannya sejak tersangka sampai menjadi terpidana maupun hak-haknya sebagai tersangka atau pun terdakwa sangat dilindungi oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sehingga dapat dikatakan bahwa proses peradilan pidana adalah *Offender minded/Offender Oriented Criminal Justice Process*. Oleh karena sangat berfokus pada kepentingan pelaku tindak pidana maka kepentingan korban (*victim's interests*) tidak

¹⁴ Laporan Tahunan Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2012, Jakarta, 2013, hlm. 43.

mendapat tempat di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pasal 14c ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebenarnya telah mengatur kepentingan korban untuk memperoleh ganti kerugian kepada pelaku melalui keputusan hakim yang berupa pidana bersyarat, di mana mengganti kerugian kepada korban dijadikan sebagai syarat khususnya. Namun karena hanya sebagai syarat khusus dari pidana bersyarat maka seringkali tidak diterapkan oleh hakim dalam menjatuhkan pidana bersyarat, sehingga tidak efektif pelaksanaannya.¹⁵

b. Ancaman Pidana Penjara terhadap Pelaku Kejahatan Ringan

Menurut ketentuan pidana pada Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, baik sebelum dan sesudah diubah oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012, ancaman pidana karena

pencurian ringan terhadap pelaku adalah pidana penjara paling lama tiga bulan. Hal ini juga berlaku terhadap ketentuan pidana pada Pasal 373, 379, dan Pasal 407 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu pelaku penggelapan ringan yang diatur pada Pasal 373, pelaku penipuan ringan yang diatur pada Pasal 379, dan terhadap pelaku merusak barang ringan yang diatur pada Pasal 407 ayat (1), yaitu masing-masing diancam pidana penjara selamalamanya tiga bulan.

4. Perbedaan Konsep Tindak Pidana Ringan Sebelum dan Sesudah Berlakunya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012

a. Perbedaan dalam Lingkup Hukum Pidana Materiil

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tidak sepenuhnya mengubah ketentuan mengenai tindak pidana ringan. Pasal-pasal yang diubah adalah mengenai pencurian ringan (Pasal 364), penggelapan ringan (Pasal 373), penipuan ringan (Pasal 379), penipuan ringan atas pembeli (Pasal 384), merusak barang ringan

¹⁵ Agustinus Pohan, Topo Santoso, Martin Moerings (Editor), *Hukum Pidana dalam Perspektif*, Pustaka Larasan, Bali, 2012, hlm. 309.

(Pasal 407), dan tadah ringan (Pasal 482). Sedangkan ketentuan mengenai penganiayaan ringan (Pasal 352), penghinaan ringan (Pasal 315), dan penganiayaan ringan binatang (Pasal 302) tidak mengalami perubahan dalam pengaturannya kecuali terhadap pidana denda.

b. Perbedaan dalam Lingkup Hukum Pidana Formil

1) Penahanan terhadap Pelaku Tindak Pidana Kejahatan Ringan

Berdasarkan Pasal 2 angka 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012, disebutkan bahwa apabila terhadap terdakwa sebelumnya dikenakan penahanan, Ketua Pengadilan tidak menetapkan penahanan ataupun perpanjangan penahanan.

2) Hukum Acara yang Digunakan dalam Pemeriksaan Perkara

Substansi perbedaan dalam hal hukum acara yang digunakan dalam pemeriksaan perkara terhadap terdakwa kejahatan ringan sesudah berlakunya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 adalah pemeriksaan perkara tidak lagi

dilakukan dengan konsep hukum acara dengan acara pemeriksaan biasa tetapi dengan konsep hukum acara dengan acara pemeriksaan cepat. Hal ini tentunya dipengaruhi oleh redefinisi ulang nilai kerugian sebagaimana diatur dalam Pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan Pasal 482 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 sehingga batasan kategori tindak pidana ringan disesuaikan dengan nilai ekonomis yang diatur dalam peraturan tersebut.

B. Permasalahan Hukum Setelah Ditetapkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

1. Terjadinya Pelanggaran Hak Asasi Manusia karena Masih Adanya Penahanan terhadap Pelaku Tindak Pidana Ringan menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 hanya isapan jempol atau angin lalu belaka karena Achmad Ali dalam hal ini telah ditahan oleh kepolisian dan kejaksaan yang berarti bahwa kedua instansi penegak hukum ini telah mengabaikan aturan hukum yang ada dan pada akhirnya terjadi pelanggaran hak asasi manusia, dengan menahan orang yang pada semestinya tidak boleh ditahan.¹⁶

2. Tanpa Eksepsi terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum, yaitu Bertentangan dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Perkara Diperiksa dengan Pemeriksaan Biasa dan Perkara Bukan Tindak Pidana Kejahatan Ringan
Permasalahan hukum terkait dengan pemeriksaan perkara dikaitkan dengan diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 adalah pemeriksaan dilakukan menurut acara biasa,

bukan pemeriksaan menurut acara cepat. Hal ini disebabkan jaksa/penuntut umum menuntut terdakwa dengan Pasal 406 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, bukan menuntut sesuai dengan ketentuan Pasal 407 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang sudah diredefinisi nilai kerugiannya oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012, yaitu semula hanya bernilai sebesar dua ratus lima puluh rupiah kemudian diubah menjadi dua juta lima ratus ribu rupiah.

3. Tidak Adanya Sosialisasi Peraturan Mahkamah Agung kepada Penuntut Umum Sehingga Penuntut Umum Tidak Mendakwa Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Salah dalam Membuat Dakwaan)
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 telah menganut Teori Fiksi Hukum yang tidak hanya wajib diketahui oleh masyarakat tetapi juga oleh penegak hukum itu sendiri.

¹⁶ Salinan Putusan Perkara Nomor: 170/PID.B/2012/PN.BDW, hlm. 12.

Teori Fiksi Hukum beranggapan bahwa begitu suatu norma hukum diberlakukan, maka pada saat itu pula setiap orang dianggap tahu hukum.¹⁷ Hal ini tentunya lebih fatal apabila penegak hukum pidana itu sendiri yang tidak tahu akan adanya suatu peraturan perundang-undangan.

G. Penutup

A. Kesimpulan

1. Konsep tindak pidana ringan sebelum dan sesudah berlakunya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memiliki perbedaan dan persamaan dalam lingkup hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Persamaan dalam lingkup hukum pidana materiil antara lain adalah terkait dengan ancaman pidana penjara terhadap pelaku dan tidak adanya perlindungan khusus terhadap korban tindak pidana kejahatan ringan. Sedangkan persamaan dalam lingkup hukum pidana formil antara lain

adalah pelaku tidak dikenakan upaya paksa berupa penahanan dalam proses pemeriksaan pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan dan hukum acara yang digunakan adalah hukum acara dengan acara pemeriksaan cepat. Perbedaan dalam lingkup hukum pidana materiil antara lain adalah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tidak sepenuhnya mengubah ketentuan mengenai tindak pidana ringan. Sedangkan perbedaan dalam lingkup hukum pidana formil antara lain adalah pelaku dalam perkara pencurian, penipuan, penggelapan, dan penadahan dikenakan penahanan apabila nilai barang atau uang yang menjadi obyek perkara lebih dari Rp. 250,-. Sedangkan setelah berlakunya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 pelaku dalam perkara pencurian, penipuan, penggelapan, dan penadahan dikenakan penahanan apabila nilai barang atau uang yang menjadi obyek perkara lebih dari Rp. 2.500.000,-.

2. Permasalahan hukum setelah ditetapkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 adalah masih

¹⁷ Agus Suro, *Fiksi Hukum Dalam Pembuatan Peraturan Perundang-Undangan*, Fakultas Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia, Jakarta, 2013, hlm. 1-2.

terjadinya pelanggaran hak asasi manusia karena masih adanya penahanan terhadap pelaku tindak pidana ringan setelah ditetapkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012, tanpa eksepsi terhadap surat dakwaan penuntut umum, yaitu bertentangan dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 maka perkara tetap diproses, diperiksa dengan pemeriksaan biasa dan perkara tersebut tidak dianggap sebagai tindak pidana kejahatan ringan, dan tidak adanya sosialisasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 kepada Penuntut Umum sehingga penuntut umum tidak mendakwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 (jaksa penuntut umum salah dalam membuat dakwaan).

B. Saran

1. Hendaknya Mahkamah Agung membuat aturan pelaksanaan dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terutama yang terkait dengan perlindungan terhadap korban tindak pidana kejahatan ringan.

2. Hendaknya para penegak hukum (polisi, jaksa, hakim, dan pengacara) menggunakan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan penuh pemahaman sehingga tidak terjadi lagi adanya dakwaan yang tidak dapat diterima dan karena tanpa adanya eksepsi maka pelaku dapat dipersalahkan atas perbuatannya.

H. Daftar Pustaka

1. Buku

- Hamzah, Andi, 2008, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Lamintang, P.A.F., 1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Muttaqien, Raisul, (Penerjemah), 2008. *Filsafat Hukum: Perspektif Historis*, Nusamedia, Bandung. Diterjemahkan dari: Carl Joachim Friedrich, *The Philosophy of Law in Historical Perspective*, The University of Chicago Press.
- Pohan, Agustinus, Topo Santoso, Martin Moerings (Editor), 2012, *Hukum*

- Pidana dalam Perspektif*, Pustaka Larasan, Bali.
- Prasetyo, Teguh, 2007, *Hukum Pidana*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Sapardjaja, Komariah Emong, 2002, *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel dalam Hukum Pidana Indonesia: Studi Kasus tentang Penerapan dan Perkembangannya dalam Yurisprudensi*, Alumni, Bandung.
- Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri, 2001, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Soesilo, R., 1984, *Pokok-pokok Hukum Pidana: Peraturan Umum dan Delik-delik Khusus*, Politea, Bogor.
- Surono, Agus. *Fiksi Hukum Dalam Pembuatan Peraturan Perundang-Undangan*, Fakultas Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia, Jakarta.
- 2. Peraturan Perundang-Undangan**
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1960 tentang Beberapa Perubahan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 3. Putusan Pengadilan**
- Salinan Putusan Perkara Nomor: 170/PID.B/2012/PN.BDW.
- 4. Jurnal/Laporan**
- Solar, Alvian, 2012, "Hakikat dan Prosedur Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan", *Jurnal Lex Crimen*, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado, Vol.I/No.1/Jan-Mrt.
- Laporan Tahunan Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2012, Jakarta, 2013.
- Laporan Tahunan Mahkamah Agung Tahun Kerja 2012.